

Analisis Pengelolaan Obat Di Puskesmas Cibalong Kecamatan Cibalong Tahun 2022 Berdasarkan Permenkes RI Nomor 74 Tahun 2016

Rizky Subagya

Farmasi, Universitas Perjuangan Tasikmalaya

Email: subagyarizky6@gmail.com

Kamiel Roesman Bachtiar

Farmasi, Universitas Perjuangan Tasikmalaya

Ayu Rahmawati

Farmasi, Universitas Perjuangan Tasikmalaya

Abstract. *Drug management at the puskesmas is an activity that includes planning needs, requests, receipts, storage, distribution, control, recording, reporting, archiving as well as management monitoring and evaluation. Drug management that is not ideal can be caused by drug planning that is only based on previous year's estimates, as well as inadequate facilities for the process of storing and distributing drugs. One way to overcome drug management that is not ideal is to compare the management of drugs at the health center with Permenkes number 74 of 2016 concerning pharmaceutical service standards at the health center. This study aims to find out how comfortable drug management is at the Cibalong Health Center with Permenkes Number 74 of 2016. This research was conducted using a qualitative method with a descriptive approach using interview guidelines and checklists based on Permenkes number 74 of 2016. Drug management data at Cibalong Health Center were taken from 3 sources, namely pharmacists, heads of health centers and pharmaceutical technical staff. From the results of the study, the results of interviews and checklists were obtained with the percentage value of planning (60%), request (83.33%), acceptance (60%), storage (72.22%), distribution (58.33%), control (60%), recording, reporting and filing (62.50%), management monitoring and evaluation (100%) with an overall average value of 69% with good criteria.*

Keywords: *Drug Management, Drug Management at Puskesmas, Permenkes Number 74 of 2016*

Abstrak. Pengelolaan obat di puskesmas merupakan kegiatan yang diantaranya mulai dari perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pengelolaan obat yang tidak ideal dapat disebabkan oleh perencanaan obat yang hanya berdasarkan estimasi tahun sebelumnya, serta sarana yang tidak memadai untuk proses penyimpanan dan pendistribusian obat. Salah satu cara mengatasi pengelolaan obat yang tidak ideal adalah dengan membandingkan pengelolaan obat di puskesmas dengan permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian pengelolaan obat di Puskesmas Cibalong dengan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan pedoman wawancara dan daftar tilik berdasarkan permenkes nomor 74 tahun 2016. Data pengelolaan obat di Puskesmas Cibalong diambil dari 3 narasumber yaitu Apoteker, Kepala Puskesmas dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Dari hasil penelitian didapatkan hasil wawancara dan daftar tilik dengan nilai presentase secara perencanaan (60%), permintaan (83,33%), penerimaan (60%), penyimpanan (72,22%), pendistribusian (58,33%), pengendalian (60%), pencatatan, pelaporan dan pengarsipan (62,50%), pemantauan dan evaluasi pengelolaan (100%) dengan nilai rata-rata keseluruhan aspek sebesar 69% dengan kriteria baik.

Kata kunci: Pengelolaan Obat, Pengelolaan Obat di Puskesmas, Permenkes Nomor 74 Tahun 2016

LATAR BELAKANG

Pengelolaan obat di puskesmas meliputi beberapa kegiatan diantaranya mulai dari perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pengelolaan obat yang tidak ideal dapat disebabkan oleh perencanaan obat yang hanya berdasarkan estimasi tahun sebelumnya, serta sarana yang tidak memadai untuk proses penyimpanan dan pendistribusian obat (Khairani et al., 2021).

Perencanaan obat dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan obat di sebuah sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang mudah dijumpai yaitu salah satunya adalah puskesmas. Sebelumnya melakukan perencanaan obat di puskesmas terlebih dahulu pengadaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat, namun di era Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) saat ini, Puskesmas dimudahkan dalam pengelolaan

logistik yaitu dengan melakukan perencanaan dan pengadaan sendiri, sehingga dalam penanganan masalah obat puskesmas lebih optimal dalam pengelolaannya. Kegiatan ini sangat didukung dengan tersedianya dana kapitasi yang diserahkan langsung ke Puskesmas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Emilia, 2018).

Peran Puskesmas yang penting dalam memberikan pengobatan di masa ini maka diperlukan pengelolaan logistik obat. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas menyampaikan bahwa optimasi dalam manajemen logistik obat yaitu meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan dan pengendalian obat yang akan dikelola oleh pihak pelayanan kesehatan.

Wilayah Kecamatan Cibalong yang sangat luas dan hanya ada satu Puskesmas yaitu Puskesmas Cibalong. Banyaknya pasien yang berobat ke Puskesmas Cibalong membuat kebutuhan obat di Puskesmas Cibalong tidak terpenuhi. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan pasien yang berobat ke Puskesmas Cibalong diberikan resep obat untuk melakukan pembelian obat di apotek, pembelian obat yang dilakukan diluar puskesmas dikarenakan adanya kekosongan obat di instalasi farmasi puskesmas cibalong. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Obat di Puskesmas Kecamatan Cibalong Tahun 2022 Berdasarkan Permenkes RI Nomor 74 Tahun 2022.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan obat di puskesmas cibalong berdasarkan Permenkes RI No.74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

TINJAUAN PUSTAKA

Puskesmas

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat (Kemenkes RI, 2019). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya (Kemenkes RI, 2019).

Pengelolaan Obat

Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat yang dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya ketepatan jumlah dan jenis perbekalan farmasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia seperti tenaga, dana, sarana dan perangkat lunak (metode dan tata laksana) dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan diberbagai tingkat unit kerja (Rismalawati et al., 2015).

Pengelolaan obat merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Proses pengelolaan obat dapat terwujud dengan baik apabila didukung dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dalam suatu sistem. Tujuan utama pengelolaan obat Kabupaten / Kota adalah tersedianya obat yang berkualitas baik, tersebar secara merata, jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di unit pelayanan kesehatan (BPOM RI, 2018).

Pengelolaan Obat di Puskesmas

Pemilihan atau seleksi merupakan tahapan awal dalam perencanaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Prinsip dasar seleksi adalah obat dan BMHP terpilih harus mempunyai manfaat terapi yang jauh lebih besar dibandingkan resikonya serta merupakan yang terbaik dibandingkan kompetitornya. Seleksi bertujuan untuk

menentukan jenis obat dan BMHP yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan serta pelaksanaan intervensi program kesehatan dalam menunjang pencapaian target pembangunan kesehatan.

Menurut Direktorat Jendral Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa perencanaan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Tujuan perencanaan obat publik dan perbekalan kesehatan adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah obat sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar termasuk program kesehatan yang telah ditetapkan.

Pengadaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai adalah suatu kegiatan dalam pengadaan dari Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota atau hasil pengadaan Puskesmas secara mandiri sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. Tujuannya adalah agar Sediaan Farmasi yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Puskesmas, dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

Menurut (Permenkes No 72 tahun 2016) Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.

Penyimpanan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap Sediaan Farmasi yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjaga, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Tujuannya adalah agar mutu Sediaan Farmasi yang tersedia di puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pendistribusian Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit/satelit farmasi Puskesmas dan jaringannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan Sediaan Farmasi sub unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah dan waktu yang tepat.

Pemusnahan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pembebasan obat-obatan milik / kekayaan dari tanggung jawab berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengendalian berhubungan dengan aktivitas dalam pengaturan persediaan bahan-bahan agar dapat dapat menjamin kelancaran proses produksi atau persediaan obat di apotek dan farmasi rumah sakit agar menjamin kelancaran pelayanan pasiennya secara efektif dan efisien (Adelheid, 2018).

Kegiatan administrasi meliputi Pencatatan dan Pengelolaan Data untuk mendukung Perencanaan Pengadaan Obat. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa rencana distribusi akan dapat didukung sepenuhnya oleh sisa stok obat dalam gudang penyimpanan Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di Puskesmas Berdasarkan Permenkes No 74 Tahun 2016

Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan (Kemenkes RI, 2016)

Kepala Ruang Farmasi di Puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang baik. (Kemenkes RI, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan kesesuaian pelayanan kefarmasian di Puskesmas Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dengan standar Permenkes nomor 74 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dalam periode waktu penelitian dari survey pendahuluan sampai dengan penelitian yang dilaksanakan Mei-Juli 2023. Pengambilan data dilakukan di Puskesmas Cibalong Kabupaten Tasikmalaya bulan Juni 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Cibalong. Sampel dalam penelitian ini adalah tenaga farmasi yaitu Apoteker di Puskesmas Cibalong yang sedang bertugas dan menjalankan pekerjaan pelayanan kefarmasian.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan pedoman wawancara dan daftar tilik berdasarkan Permenkes No 74 Tahun 2016.

Melakukan pemilihan informan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja, artinya informan yang dipilih adalah yang mengetahui permasalahan dan terlibat langsung dalam permasalahan penelitian, untuk mendapatkan data yang baik serta mampu mengemukakan pendapatnya secara baik dan benar.

Instrument penelitian adalah alat bantu yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, instrument penelitian dapat berupa kuesioner, formulir observasi, formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan sebagainya.

Statistik deskriptif dipilih dalam melakukan analisis data penelitian ini, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul dengan adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelayanan farmasi di Puskesmas Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan di ruang farmasi dan Apoteker sebagai penanggung jawab, sesuai dengan Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian mencakup pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai.

Pembahasan

a. Perencanaan

Berdasarkan hasil pengamatan dalam perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, mempunyai tim perencana obat terpadu (POT) dengan Apoteker sebagai ketua dan melibatkan seluruh tenaga kesehatan di puskesmas, yaitu dokter, dokter gigi, bidan, dan perawat, serta pengelola program yang berkaitan dengan pengobatan. Seleksi dalam perencanaan sediaan farmasi sudah mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi sediaan farmasi sebelumnya, data mutasi sediaan farmasi, dan rencana pengembangan. Namun, karena adanya beberapa penyakit seperti hipertensi, yang meningkat perkembangannya, sehingga pertimbangan pola penyakit menjadi tidak terkendali dan perencanaan yang dilakukan tidak seperti yang diharapkan.

b. Permintaan

Kegiatan permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dilakukan tiap bulan melalui LPLPO yaitu Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat yang dikirimkan pada UPT Farmasi setelah ditanda tangani oleh Apoteker dan Kepala Puskesmas.

c. Penerimaan

Kegiatan penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Cibalong Kabupaten Tasikmalaya dilakukan oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dengan memeriksa kesesuaian jumlah yang tertera dalam LPLPO. Sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang diterima dalam satuan boks / kemasan asli dari pabriknya. Pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah memeriksa sediaan (dusnya masih bagus atau sudah penyok), tanggal kadaluwarsa dan nomor batch, dan bila diragukan segera dipisahkan untuk kemudian dilaporkan kepada UPT Kabupaten Tasikmalaya. Terdapat buku catatan obat rusak dan kadaluwarsa.

d. Penyimpanan

Sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Cibalong Kabupaten Tasikmalaya disimpan di dalam gudang obat puskesmas yang berada dalam ruangan farmasi, sehingga untuk dapat masuk ke dalam gudang obat harus masuk ruangan farmasi karena menyatu dengan ruangan farmasi langsung. Sediaan farmasi padat seperti tablet

disimpan bersama dengan sediaan cair, begitu juga dengan semi padat dan obat suntik disimpan bersamaan karena ruang penyimpanan yang tidak memadai.

Lebar ruangan 6x7 meter, ruangan sangat padat karena di tempati lemari penyimpanan obat, pada lemari dan rak tiap golongan obat tidak lengkap, lemari hanya seadanya, kondisi lemari penyimpanan obat dikatakan kurang baik karena di lemari penyimpanan obat tidak terdapat kunci. Lemari pendingin berjumlah 1 buah, suhu lemari pendingin/kulkas dikontrol tiap hari dan dicatat dalam kartu kontrol suhu. dan terdapat lemari penyimpanan obat narkotik dan psikotropik namun seadanya atau kurang baik. Didalam ruangan tidak ada ac atau pendingin ruangan dan hanya mengandalkan ventilasi.

e. Pendistribusian

Distribusi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Cibalong Kabupaten Tasikmalaya pada sub unit pelayanan di Puskesmas seperti Posyandu dilakukan setelah ada permintaan dari sub unit seperti untuk obat-obat program diantaranya garam oralit dan tablet tambah darah. Pengeluaran sediaan farmasi dan BMHP menggunakan SBBK yang ditandatangani oleh Apoteker. Distribusi dilakukan sesuai permintaan dan tidak ada jadwal khusus. Pendistribusian ke sub unit (poli gigi, ruang tindakan, dan lain-lain) dilakukan dengan cara pemberian obat sesuai resep yang diterima (Unit Dose Dispensing).

f. Pengendalian

Pengendalian sediaan farmasi untuk mencegah kekurangan dan kekosongan obat. Pencatatan dalam kartu stok diusahakan setiap transaksi walaupun masih ada yang tidak sesuai seperti yang tertulis pada kartu stok. Pencacahan fisik obat dilakukan tiap akhir bulan atau (stok opname). Kartu stok yang tidak terdapat di masing-masing item obat dikarenakan adanya salah satu Tenaga Teknis Kefarmasian yang menyimpan kartu stok tersebut tidak sesuai item obatnya sehingga terdapat beberapa item obat yang tidak sesuai kartu stoknya.

g. Pencatatan, Pelaporan dan Pengarsipan

Pencatatan dan pelaporan dilakukan terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam pengelolaan sediaan farmasi, sediaan farmasi yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di Puskesmas Cibalong Kabupaten Tasikmalaya. Namun untuk program tidak dapat dilaporkan secara tepat data dikarenakan obat-obat tersebut disimpan dan dikelola oleh pemegang program Puskesmas yang berbeda. Pencatatan dan pelaporan ini

digunakan sebagai sumber data untuk pengelolaan obat di Puskesmas. Pengarsipan disimpan sekurang kurangnya tiga tahun sebelum kemudian dilakukan pemusnahan.

h. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan

Hasil penelitian di Puskesmas Cibalong, informan mengatakan bahwa Puskesmas Cibalong melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan obat berdasarkan SPO yang telah di tanda tangani oleh Kepala Puskesmas Cibalong, pemantauan obat juga dilakukan oleh petugas farmasi agar obat yang telah diminta namun tidak terpakai tidak akan dibuatkan lagi permintaan pada bulan selanjutnya.

Standar Prosedur Operasional untuk pelayanan kefarmasian di Puskesmas Cibalong belum direvisi, masih menggunakan SPO tahun 2019, dimana yang mengesahkan / menandatangani adalah Kepala Puskesmas yang telah mutasi ke tempat lain. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dilakukan secara periodik oleh Kepala Puskesmas, yaitu setiap akhir bulan pada saat Apoteker melakukan laporan bulanan menggunakan LPLPO. Setiap kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai mempunyai standar prosedur operasional, namun SPO tersebut belum diperbaharui, SPO tersebut dibuat pada tahun 2019 dimana Puskesmas Cibalong sedang melakukan penilaian akreditasi. Kegiatan pelayanan kefarmasian belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional yang ada tersebut. Standar Prosedur Operasional (SPO) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. SPO tersebut diletakkan di tempat yang mudah terlihat baik di ruangan farmasi maupun di ruang penyimpanan obat di Puskesmas Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, pelayanan kefarmasian di Puskesmas Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, telah sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Namun, evaluasi menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan dengan pencapaian hanya mencapai 69%.

Kedua, ketersediaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di sarana pelayanan menjadi masalah utama yang disebabkan oleh minimnya data pola penyakit, permintaan obat yang tak terpenuhi, serta kendala dalam penyimpanan akibat keterbatasan ruang.

Oleh karena itu, beberapa saran diajukan. Pertama, Puskesmas perlu mematuhi pedoman pengelolaan obat secara komprehensif sesuai peraturan yang berlaku. Kedua, perlu adanya SOP yang jelas dalam pemusnahan obat yang tidak memenuhi syarat. Ketiga, perhatian lebih harus diberikan pada kebersihan dan keluasan ruangan penyimpanan obat. Terakhir, Dinas Kesehatan perlu merespons permintaan obat dengan lebih baik agar terhindar dari kelangkaan atau kelebihan stok obat.

DAFTAR REFERENSI

- Adelheid. (2018). Manajemen pengelolaan obat terhadap ketersediaan obat di instalasi farmasi rumah sakit umum daerah kudungga sangatta kabupaten kutai timur. *Jurnal Administrasi Kebijakan Kesehatan*, 1–152.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2020). Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, 88, 1–155.
- BPOM RI. (2018). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia*, 1–50.
- BPOM RI. (2018). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia*, 1–16.
- Emilia. (2018). Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Lambunu 2 Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1), 104–114.
- Fathiyah, R. (2018). Perencanaan dan pengadaan obat di Puskesmas “X” berdasarkan permenkes nomor 74 tahun 2016. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 6(74), 15–20.
- Kementrian Kesehatan RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079. <https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2013.06.007>
- Kementrian Kesehatan RI & JICA, (2010), Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian Di Puskesmas, 2010, Jakarta, Kementrian Kesehatan RI
- Khairani, R. N., Latifah, E., & Nila Septianingrum, N. M. A. (2021). Evaluasi Obat Kadaluwarsa, Obat Rusak dan Stok Mati di Puskesmas Wilayah Magelang. *Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 8(1), 91. <https://doi.org/10.20473/jfiki.v8i12021.91-97>
- Mailoor, R. J., Maramis, F. R. R., Mandagi, C. K. F., Kesehatan, F., Universitas, M., & Ratulangi, S. (2016). Analisis Pengelolaan Obat di Puskesmas Danowudu Kota Bitung. *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, 1–14.
- Malota, F. W. E., Lolo, W. A., & Citraningtyas, G. (2019). Analisis Perencanaan Pengadaan Obat Antibiotik Berdasarkan Analisis Abc Indeks Kritis Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk. *Pharmacon*, 8(1), 51. <https://doi.org/10.35799/pha.8.2019.29235>
- MENKES. (2014). PMK No. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 2014, 1–15.
- (Menkes RI) Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019. Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.

- (Menkes RI) Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016. Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Nahriyah, N. (2016). Hubungan Kualitas Pelayanan Kesehatan. *As Siyazah*, 5(12), 1–13.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2013. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No.75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Renaldi, R., & Nanda, D. (2017). Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017. *Menara Ilmu*, XI(78), 101–107.
- Rismalawati, Lestari, H., & Ahmad, L. O. A. I. (2015). Studi Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Lawa Kabupaten Muna Barat Tahun 2015. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Riduwan. 2013. Rumus dan Data Dalam Analisa Statistika. Bandung : Alfabeta.
- Sukam, T. M. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan Obat Pada Masa Pandemi Covid19 Di Puskesmas Aek Korsik Kabupaten Labuhan Batu Utara. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(3), 6.
- Sulrieni, Ilma Nuria. Rozalina, S. (2019). Analisis Manajemen Logistik Obat Di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang Analysis of Drug Logistic Management in Lubuk Buaya Puskesmas Padang. *Jurnal Kesehatan Saintika Medito*, 1(2). <https://jurnal.syedzasaintika.ac.id>
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:UNPAD.
- Tim May, Malcolm Williams, Richard Wiggins, and P. A. B. (2021). Analisis Manajemen Pengelolaan Obat Di Puskesmas Tanjung Aur Kab.Lahat Tahun 2021. In *Jurnal ilmu Kesehatan Bina Husada* (Issue 1996).
- Wiku, A. (2009). Sistem Kesehatan Edisi Kedua. *Raja Grafindo Persada*, 2014–2016.